

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan laporan keuangan ialah penyajian data terstruktur mengenai informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan yang mengandung kinerja dan posisi keuangan beserta perubahannya dalam periode tertentu. Semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan akan menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk selanjutnya membuat keputusan ekonomi atau investasi. Pihak yang dimaksud sebelumnya adalah para investor, pemerintah, kreditur, karyawan serta pemakai lainnya. Kualitas data yang disajikan pada laporan keuangan harus diperhatikan dengan baik supaya menyediakan informasi yang sesuai dan tidak keliru. Sehingga tidak ada kesalahan dalam keputusan yang dibuat berdasarkan laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (IAI, 2015) menyampaikan bahwa sejatinya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan yakni *relevance* dan *reliable*. Maknanya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebab nantinya laporan keuangan menjadi dasar keputusan ekonomi para pengguna laporan tersebut. Dengan demikian menjadi penting untuk menyusun dan menyampaikan suatu laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

Selanjutnya, laporan keuangan mempunyai peran penting bukan hanya untuk para *stakeholder* namun juga untuk para manajer. Laporan keuangan bagi manajer berguna sebagai sarana untuk bentuk dari tanggung jawab pekerjaannya dari sumber daya para pemilik. Hal penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsistensi atas prinsip akuntansi yang digunakan dari tahun ke tahun. Prinsip akuntansi setiap perusahaan harus berdasarkan atas *experience*, *cause* dan *usability*. Hal tersebut disebut dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Sedangkan yang berlaku di Indonesia

disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat PSAK, yang menggunakan prinsip *Fair Value*. *Fair Value* merupakan prinsip pengukuran untuk aset dan liabilitas yang berbasis nilai pasar (PSAK 68, 2015).

Menurut Nicolin dan Sabeni (2013) keterangan dan data dalam laporan keuangan harus dapat memiliki kegunaan praktis bagi para pengguna. Menjadi penting bagi pengguna untuk dapat memahami secara utuh laporan keuangan tersebut. Lebih lanjut, laporan keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif terdiri dari kualitas utama dan pendukung. Kualitas utama yaitu; relevansi dan representasi yang benar. Sedangkan kualitas pendukung terdiri atas bisa dikomparasi, bisa dikonfirmasi, ketepatan waktu dan bisa dimengerti. Salah satu penyebab jatuhnya perusahaan adalah tidak terpenuhinya karakteristik kualitatif informasi akuntansi tersebut. Sebagai contoh, kasus pada perusahaan besar seperti *Tyco*, *Merck*, *Worldcom* di Amerika Serikat. Kasus serupa juga dialami perusahaan dalam negeri seperti kasus Kimia Farma serta Jatisari. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya dikenal memiliki kualitas audit yang mumpuni.

Kasus besar yang belum lama ini terjadi di Indonesia adalah mengenai permasalahan laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Akibat dari permasalahan ini adalah sejumlah auditor dan kantor akuntan publik (selanjutnya disebut sebagai KAP) mendapat sorotan oleh masyarakat. KAP tersebut adalah sebagai berikut; KAP Tanubrata Sutanto dan Rekan serta Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea. KAP tersebut merupakan anggota dari BDO Internasional yaitu KAP *non big-four*.

Kasus ini bermula dari hasil akhir laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tahun 2018. Laporan keuangan tahun 2018 menyatakan, Garuda Indonesia Group berhasil mendapatkan laba bersih atau *net income* sejumlah USD 809.850 atau dalam mata uang Rupiah setara dengan Rp. 11.337.900.000 (dengan kurs sebesar Rp. 14.000 per USD). Laba bersih tersebut meningkat secara signifikan jika dibandingkan pada keadaan keuangan pada tahun 2017. Di tahun 2017 yang lalu, dilaporkan bahwa kerugian mereka mencapai angka USD 216,5 juta. Melihat lonjakan angka yang

tajam, Dony Oskaria dan Chairul Tanjung sebagai salah satu komisaris mengatakan bahwa laporan keuangan tahun 2018 meyimpang dari PSAK. Diketahui Garuda Indonesia memasukkan utang dari PT Mahata Aero Teknologi kepada Garuda kedalam keuntungan pada laporan keuangan tahun 2018. Pada tanggal 2 Mei 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas pengakuan pendapatan oleh Garuda untuk periode 2018. PT Mahata Aero Teknologi yang pada saat itu memiliki kontrak kerja sama dengan Garuda, memiliki utang sejumlah USD 239 juta untuk Garuda. Kemudian Garuda memasukkan utang oleh Mahata Aero kedalam pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018. Kasus ini diakhiri pada 28 Juni 2019 dengan pemberian sanksi kepada PT Garuda Indonesia dari sejumlah pihak. Selain itu, auditor atas laporan keuangan tahun 2018 yang sudah disebutkan sebelumnya, turut mendapatkan sejumlah sanksi dan teguran keras dari Kementerian Keuangan

Struktur kepemilikan saham pada PT Garuda Indonesia pada periode 2018 adalah :

Tabel 1. Struktur Kepemilikan Saham PT Garuda Indonesia Periode 2018

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham
1.	Negara Republik Indonesia	60,54%
2.	Institusi Dalam Negeri dan Luar Negeri	33.26%
3.	Perorangan	5.95%
4.	Kepemilikan Manajerial	0.25%

Sumber : Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Periode 2018

Kasus mengenai laporan keuangan seperti yang dialami oleh PT Garuda Indonesia tersebut dapat menimbulkan sejumlah akibat. Salah satunya dapat menimbulkan keraguan pengguna laporan keuangan terhadap integritas laporan itu sendiri. Lebih lanjut akan muncul keraguan terhadap integritas pembuat laporan keuangan tersebut yakni auditor serta manajemen yang telah memberikan penilaian. Arista dkk (2019) mengatakan ada 2 pengukuran untuk integritas laporan keuangan yaitu dengan mengukur manajemen laba atau dengan indeks konservatisme.

Aplikasi *corporate governance* dalam perusahaan merupakan satu dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh atas integritas suatu laporan keuangan.

Julius Yoga Inganta Sinulingga, 2020

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sebagai contoh aplikasinya adalah adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dapat berperan sebagai upaya pengawasan dalam internal perusahaan demi mengurangi potensi konflik keagenan. Lebih lanjut, struktur kepemilikan yang dimaksud merupakan kepunyaan saham oleh kelompok institusional beserta manajerial. Kepemilikan saham perusahaan dari suatu lembaga atau insitusi disebut kepemilikan institusional. Selanjutnya pemegang saham institusional dapat berfungsi sebagai pengawas atas setiap tindakan dan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan. Tindakan pengawasan tersebut pada dasarnya merupakan upaya dorongan untuk manajer agar dapat memajukan kinerja dirinya sendiri maupun internal perusahaan serta diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistis (Arista dkk, 2019). Sedangkan untuk jenis yang kedua, kepemilikan manajerial berarti kepemilikan saham berada di tangan manajer. Kondisi kepemilikan ini akan cenderung membuat manajer berusaha menentukan keputusan dan kebijakan yang baik agar tidak merugikan pihak pemegang saham, karena dalam kondisi ini manajer termasuk pemegang saham. Di satu sisi, dalam kepemilikan saham mayoritas oleh manajer akan menimbulkan dampak bagi manajer yaitu baik maupun buruk dari setiap tindakan yang diputuskan oleh manajer itu sendiri (Arista dkk, 2019). Kasus manipulasi informasi keuangan umumnya menyangkut pihak *Chief Executive Officer*, auditor eksternal atau internal, jajaran dewan komisaris dan komite audit. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan keraguan para pemegang saham terhadap kredibilitas manajerial internal perusahaan, baik dalam urusan pengelolaan maupun dalam struktur kepemilikan. Banyaknya penyalahgunaan otoritas pada dasarnya disebabkan karena buruknya sistem pengelolaan perusahaan. Verva dkk (2016) menyatakan bahwa alat terpenting demi menciptakan efektifitas dan efisiensi perusahaan yang baik serta mengurangi kemungkinan tindakan manipulasi adalah penerapan *corporate governance* secara efektif dan tepat didalam perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajaryani (2015) yang menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2008-2013 dan penelitian Savitri (2016) yang menggunakan sampel perusahaan yang telah

tercatat pada BEI untuk periode 2014, mengatakan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan penelitian oleh Nurdiniah & Pradika (2017) yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang telah tercatat pada BEI pada periode 2013-2015, mengatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Kepemilikan manajerial dikatakan memiliki pengaruh positif oleh penelitian Arista dkk (2019) yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015-2017, tetapi penelitian Savitri (2016) mengatakan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Selain aspek aplikasi *corporate governance*, integritas suatu laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor ukuran dari KAP yang dimandatkan untuk memeriksa laporan tersebut. Dikatakan demikian karena ukuran KAP mempunyai hubungan dengan kualitas audit yang dilakukan (Lennox, 1999). KAP yang besar dianggap mempunyai tanggungjawab yang lebih besar atas hasil auditnya karena KAP besar mempunyai nama baik yang harus dijaga sehingga KAP besar dianggap lebih mampu untuk mempertahankan independensinya dalam mengaudit daripada KAP kecil yang dianggap lebih berorientasi lebih terhadap membangun relasi yang baik dengan perusahaan untuk menambahkan klien yang mengakibatkan KAP kecil terlalu bergantung terhadap perusahaan. Oleh karena itu diharapkan KAP besar mampu memberikan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan supaya lebih terpercaya. Penelitian sebelumnya oleh Sukanto & Widaryanti (2018), yang menggunakan sampel perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 dan penelitian oleh Savitri (2016) mengatakan ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan penelitian oleh Lubis dkk (2019), yang menggunakan sampel perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016, mengatakan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan pengembangan dari penelitian Sukanto dan Widaryanti (2018), dengan beberapa perbedaan seperti, untuk penelitian ini tidak menggunakan variabel komisaris independen dan komite audit, juga terdapat perbedaan proksi integritas laporan keuangan yang digunakan, dimana untuk penelitian ini digunakan proksi manajemen laba, sedangkan penelitian oleh Sukanto dan Widaryanti menggunakan indeks konservatisme. Perbedaan demikian turut terlihat dalam objek penelitian. Penulis menggunakan objek berupa data perusahaan BUMN yang telah tercatat pada BEI pada periode 2015-2018, sedangkan penelitian oleh Sukanto dan Widaryanti menggunakan sampel perusahaan bidang *real estate* dan properti yang telah tercatat pada BEI tahun 2013-2015. Pemilihan objek penelitian didasarkan karena maraknya kasus penyimpangan laporan keuangan yang dilakukan beberapa perusahaan BUMN seperti kasus pada PT Garuda Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asrabi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan serta pustaka bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi keuangan terutama tentang pentingnya integritas laporan keuangan dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa kuliah.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Perusahaan :

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan serta rujukan bagi pengembangan kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan dengan upaya meningkatkan integritas dari laporan keuangan.

b. Bagi Regulator :

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi lebih lanjut untuk mengembangkan regulasi untuk menjaga dan menjamin integritas atas laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar pada BEI.

c. Bagi Auditor :

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk auditor dalam pengecekan integritas laporan keuangan perusahaan, terutama bagi auditor KAP non-*Big Four* dan menambah kesadaran terhadap pentingnya independensi sehingga meningkatkan kinerja.